

KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PERANG PROXY: UPAYA UNTUK MEMBERANTAS BAHAYA KORUPSI DI INDONESIA

CORRUPTION AS PART OF PROXY WAR: EFFORT TO ERADICATE THE DANGER OF CORRUPTION IN INDONESIA

Raden Mas Jerry indrawan¹ dan Bayu Widiyanto²

Universitas Paramadina

(jerry_indrawan18@yahoo.co.id & widiyantosawyer@gmail.com)

Abstrak – Korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Akan tetapi, korupsi adalah sebuah medan peperangan yang sama sekali jauh berbeda dengan terminologi perang yang kita biasa pahami. Perang jenis ini adalah perang tanpa senjata, tanpa tentara, dan tanpa teritori. Perang ini adalah pertempuran yang tidak menyerang dengan bedil, tetapi menyerang hati nurani manusia dengan godaan materialisme. Korupsi dapat membahayakan perkembangan ekonomi Indonesia, serta membuat masyarakat kita miskin. Korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di hampir semua sektor. Hal itu menjadi alasan penulis menganggap bahwa korupsi adalah bagian dari perang *proxy*. Untuk memerangi korupsi, tentunya tindakan penindakan saja tidak cukup, untuk itu diperlukan tindakan pencegahan agar ancaman ini tidak terus-menerus membudaya. Untuk itu, program bela negara dapat digunakan sebagai sarana efektif upaya pemberantasan korupsi. Dalam tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa korupsi adalah bagian dari perang *proxy*, dan juga bagaimana program bela negara dapat digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : korupsi, kemiskinan, perang *proxy*, pertahanan negara, dan bela negara

Abstract – Corruption is the main enemy of this nation. However, corruption is a battlefield that is far different from the usual terminology of war that we understand. This type of war is a war without weapons, without an army and territories. This war is a battle that does not attack with a rifle, but attack the human conscience to the temptations of materialism. Corruption results in the destruction of the national order in Indonesia, in almost all sectors. It was the reason that the authors assume that corruption is part of a proxy war. To combat corruption, of course, enforcement action alone is not enough, it is necessary for preventive action so that these threats will not become a culture. For that, the civil defense program may be used as an effective means to eradicate corruption. In this paper, the authors want to show that corruption is part of a proxy war, and also how the civil defense program could be used to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: corruption, poverty, proxy war, state defense, and civil defense

¹ Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis buku Studi Strategis dan Keamanan.

² Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Paramadina dengan mengambil Program Studi Hubungan Internasional. Aktif di Universitas Paramadina Model of United Nations (MUN) sebagai Student Ambassador.

Pendahuluan

Dalam beberapa kesempatan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi sebuah kondisi peperangan baru, yang beliau istilahkan dengan perang *proxy*. Istilah perang *proxy* sendiri memang bukan terminologi baru karena sudah sejak lama digunakan. Akan tetapi, varian dan cakupan dari perang *proxy* yang dimaksudkan panglima sekarang sudah sangat berbeda dengan pengertiannya yang lampau. Perang *proxy* sekarang adalah sebuah jenis perang yang tanpa bentuk, tidak jelas siapa lawan maupun kawan. Panglima menyebutkan, beberapa contoh perang *proxy* seperti perjuangan bersenjata, demonstrasi massa, regulasi yang merugikan, sampai bentrok antarkelompok.³

Dalam kesempatan lain, Panglima juga mengatakan bahwa perang ke depan adalah perang pangan, air, dan energi. Menurut beliau, banyak cara dilakukan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Beliau juga menambahkan, saat ini sudah terasa adanya *proxy war* karena sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Caranya adalah dengan menguasai media di Indonesia, menciptakan adu domba TNI-Polri, rekayasa sosial, perubahan budaya, pecah

³ Merdeka, "Proxy war, perang yang ditakuti Jenderal Gatot terjadi di Indonesia", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/proxy-war-perang-yang-ditakuti-jenderal-gatot-terjadi-di-indonesia.html>, diakses pada 20 Januari 2017.

belah partai, dan penyelundupan narkoba yang sudah jauh-jauh hari dilakukan. Negara musuh akan membiayai semua kebutuhan yang diperlukan dengan imbalan kekuatan lawan terpecah-belah. Pihak ketiga itu, yakni *non-state actors*, bisa berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa, kelompok masyarakat, atau perorangan.⁴

Secara teori, perang memang memiliki banyak bentuk, ada yang bersifat simetris dan asimetris. Perang *proxy* sendiri adalah perang yang menggunakan pihak ketiga yang sedang terlibat dalam perang atau konflik bersenjata.⁵ J. Suryo Prabowo memberikan contoh yang baik dalam bukunya, bahwa perang yang menggunakan pihak ketiga untuk menghancurkan pemerintahan suatu negara adalah perang yang jauh lebih murah dan efektif, untuk paling tidak merusak suatu negara yang berdaulat.⁶

Menurut pakar militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo, perang *proxy* adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, dimana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan *proxy* alias wakil atau kaki tangan. Perang *proxy* juga bisa dianggap bagian dari modus perang asimetris. Berbeda dengan jenis

⁴ Rappler, "Harga pangan naik, Panglima TNI ingatkan Proxy War", dalam <http://www.rappler.com/indonesia/134777-harga-pangan-naik-panglima-tni-proxy-war>, diakses pada 20 Januari 2017.

⁵ J. Suryo Prabowo, *Operasi Lawan Insurgensi: Bukan Hanya Operasi Militer*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional, 2013), hlm. 7.

⁶ *Ibid*, hlm. 19.

perang konvensional, perang asimetris bersifat *irregular* dan tidak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Tendensi perang di masa depan memungkinkan untuk dilakukan secara terselubung, dan mampu menyebabkan kelumpuhan yang mematikan. Memanfaatkan pihak ketiga untuk memuluskan kepentingan suatu negara dipandang lebih efektif ketimbang berhadapan-hadapan secara diametral.⁷

Setelah sedikit memahami tentang perang *proxy*, penulis akan sedikit membahas juga tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Korupsi juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi.⁸ Pengertian atau asal kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang akhirnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption*. Pengertian korupsi secara harfiah berarti jahat, busuk, rusak, dan dapat disuap.⁹

Mengamati kecenderungan perang dewasa ini adalah perang yang tidak kelihatan, tanpa bentuk, dan bukan perang langsung, maka penulis berpendapat

bahwa perang *proxy* adalah sebuah bentuk perang yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saat ini. Kita bisa melihat konstelasi politik dunia saat ini cenderung mengarah pada sifat-sifat perang yang konsisten dengan sifat perang *proxy*. Perang dilakukan secara semu (*pseudo*) agar siapapun yang mempunyai kepentingan strategis dalam perang tersebut tetap tidak terlibat secara langsung, atau bahkan tidak diketahui sama sekali.

Kondisi itulah yang menurut penulis bersinggungan dengan korupsi di Indonesia. Karena korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di hampir semua sektor, maka penulis menganggap bahwa korupsi adalah bagian dari perang *proxy*. Jika terjadi secara terus-menerus, maka kedaulatan dan keselamatan bangsa ini akan sangat terancam. Untuk itulah, dalam tulisan ini penulis ingin menunjukkan bahwa korupsi adalah bagian dari perang *proxy*, dan juga bagaimana program bela negara dapat digunakan untuk menghadapi bahaya korupsi di Indonesia.

Korupsi Memiskinkan

Korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Banyak anak bangsa yang dimiskinkan oleh karena tindak pidana korupsi, di mana di sisi lain para pelakunya menikmati kekayaan yang berlimpah. Korupsi adalah perang yang tidak kelihatan. Perang konvensional mensyaratkan adanya konflik berskala besar antar (beberapa)

⁷ CNN, "Soekarno Sudah Ramalkan Ancaman Perang Proxy di Indonesia", dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151220194759-20-99440/soekarno-sudah-ramalkan-ancaman-perang-proxy-di-indonesia/>, diakses pada 12 Januari 2017.

⁸ Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed), *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: CSRC UIN, 2011), hlm. 28.

⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 Versi UU Nomor 30 tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

negara atau di dalam negara, yang terkait dengan masalah kedaulatan dan atau keutuhan wilayah suatu negara; permusuhan antara dua negara atau bangsa; pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya) atau lebih; perkelahian atau konflik; dan cara mengungkapkan permusuhan.¹⁰

Akan tetapi, korupsi adalah sebuah medan peperangan yang sama sekali jauh berbeda dengan terminologi perang yang kita biasa pahami. Perang jenis ini adalah perang tanpa senjata, tanpa tentara, dan tanpa teritori. Perang ini adalah pertempuran yang tidak menyerang dengan bedil, tetapi yang menyerang hati nurani manusia dengan godaan materialisme. Kesulitan berperang dalam perang jenis ini, bahwa yang diperangi adalah anak bangsa sendiri.

Lebih lanjut, pertanyaan terkait apakah korupsi adalah jenis perang *proxy*, dengan jelas penulis menjawab ya. Korupsi memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit beranjak dari angka 6%, terutama pasca reformasi, adalah karena tingginya tingkat korupsi di negeri ini. Menurut *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* tahun 2015, skor Indonesia adalah 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup,

¹⁰ Jerry Indrawan, *Studi Strategi dan Keamanan*, (Depok: Nadi Pustaka, 2015), hlm. 95.

sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Skor rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya, skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.¹¹

Atas dasar itulah, penulis berpendapat bahwa kemiskinan muncul, dan juga bertahan di Indonesia, karena tingkat perekonomian yang tidak membaik. Lalu, tingkat perekonomian kita tidak membaik karena tingkat korupsi yang tinggi. Itulah pertalian erat antara ekonomi dengan korupsi. Korupsi dapat membahayakan perkembangan ekonomi sebuah negara. Itulah sebabnya mengapa korupsi dapat membuat masyarakat Indonesia miskin. Argumen ini didukung beberapa studi empiris yang menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat memperlemah kinerja perekonomian suatu negara.

Pertama, korupsi menurunkan tingkat investasi, baik dalam negeri maupun asing. Kedua, korupsi menimbulkan distorsi pada perkembangan perusahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi non-formal. Ketiga, korupsi menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi publik, serta memperburuk infrastruktur fisik. Keempat, menurunkan pemasukan publik dan menghambat kesempatan untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum. Dan kelima,

¹¹ Transparency International Indonesia, "Corruption Perceptions Index 2015: Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik", dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>, diakses pada 21 Januari 2017.

korupsi merugikan kaum miskin.¹²

Mengapa korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang begitu besar pada perekonomian Indonesia? Ada beberapa penjelasan pokok yang menerangkan hal tersebut. Pertama, sebagaimana telah disebut, hilangnya kesempatan penanaman modal di dalam negeri telah mengakibatkan kemerosotan angka pertumbuhan perkapita sebesar kira-kira satu unit persentase. Dalam beberapa hal telah terjadi penurunan jumlah penanaman modal langsung yang disebabkan oleh praktik-praktik korupsi.¹³

Kedua, kadang kala juga terjadi bahwa investor yang “advonturir” mengusir investor yang baik (*bad investors drive good investor out phenomenon*). Menurut teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), hal ini akan mengurangi pengaruh dari peningkatan perubahan dalam total produktivitas faktor-faktor produksi (kombinasi modal, tenaga kerja, teknologi dalam kegiatan produksi di sektor riil) di Indonesia, yang pada gilirannya akan menurunkan lajur pertumbuhan ekonomi perkapita jangka panjang.¹⁴

Ketiga, korupsi dapat juga menurunkan mutu prasarana fisik, yang kemudian dapat menaikkan biaya-biaya transaksi dan mengurangi daya saing sektor swasta di pasaran dunia. Hal ini

terlihat pada lima macam infrastruktur, yaitu jalan raya, giliran mati lampu, gangguan telekomunikasi, kebocoran dalam penyediaan air bersih, dan penggunaan diesel dalam perkeretaapian. Negara yang marak korupsi biasanya mempunyai infrastruktur yang buruk. Selain itu, negara dengan tingkat korupsi tinggi biasanya mempunyai pengeluaran operasional dan pemeliharaan yang jumlahnya rendah. Hal ini menurunkan produktivitas pengeluaran publik dan mengakibatkan kemerosotan mutu infrastruktur.¹⁵

Keempat, korupsi cenderung mengurangi pengeluaran di bidang sosial, termasuk pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Penurunan anggaran untuk dua pos anggaran ini pada gilirannya akan membatasi pertumbuhan potensial, terutama dalam peningkatan produktivitas. Menurut teori pertumbuhan baru dan pengalaman negara industri, maupun negara industri baru, mutu modal manusia (*human capital*) memainkan peran penting tidak hanya dalam proses pertumbuhan, melainkan juga dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Praktik ini juga berlangsung di Indonesia, di mana pengeluaran untuk bidang sosial lebih kecil dibanding pengeluaran rata-rata untuk pos serupa di negara industri, maupun negara yang baru memasuki tahap industrial.¹⁶

Kelima, korupsi juga mengurangi potensi pemasukan dari pajak, terutama karena pertumbuhan kegiatan sektor

¹² Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim (ed), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hlm. 2-3.

¹³ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17-18.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 18-19.

ekonomi informal. Beban pungutan yang terlalu besar dan praktik jual-beli kewenangan jabatan di lingkungan perekonomian formal mendorong perusahaan-perusahaan untuk cenderung pindah ke sektor informal dan membayar pajak lebih sedikit. Merosotnya pendapatan pajak berkaitan dengan pengurangan pemberian jasa publik yang penting, seperti penegakan hukum, pendapatan rendah bagi pejabat pemerintah.

Kondisi ini memperbesar lingkungan sektor ekonomi informal dan menambah insentif untuk korupsi. Gejala ini menunjukkan hubungan negatif dalam rasio antara insentif publik, maupun pribadi dan korupsi. Praktik korupsi telah mengakibatkan perbedaan antara laju pertumbuhan ekonomi aktual dan potensial di Indonesia sebesar 0.81 hingga 1.2 unit persentase. Biaya korupsi cenderung membesar karena dampak lipat ganda dan kemerosotan prestasi Indonesia dalam menindak praktik-praktik korupsi.¹⁷

Lima penjelasan di atas membuktikan pendapat penulis di awal bahwa korupsi sangat berpengaruh pada sektor perekonomian sebuah negara, yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan menjadi sulit dibasmi karena beban korupsi. Hal ini karena orang miskin tidak punya uang untuk menyogok pejabat pemerintah, termasuk tidak memiliki akses di dunia politik. Berikut lima dampak buruk korupsi terhadap kaum miskin.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

Pertama, korupsi membuat mereka cenderung menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Kedua, investasi dalam prasarana cenderung mengabaikan proyek-proyek yang menolong kaum miskin. Ketiga, orang miskin dapat terkena pajak regresif. Keempat, kaum miskin menghadapi kendala dalam menjual hasil pertanian mereka akibat tingginya biaya pemasaran, terutama yang berhubungan dengan pungutan, baik legal maupun ilegal. Dan kelima, menurunnya kemampuan untuk melepaskan diri dari kemelaratan akibat transmisi kemiskinan antargenerasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk meningkatkan kapasitas untuk bersaing.¹⁸

Dampak korupsi tersebut sangat kentara pada kasus Indonesia. Banyak pengeluaran di Indonesia yang cenderung anti-kaum miskin. Sebagai contoh, subsidi yang semula dimaksudkan untuk pemerataan pendapatan kepada kaum miskin terbukti hanya menguntungkan kaum yang berada. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) misalnya, 70%-90% dinikmati oleh orang kaya yang pada gilirannya menyebabkan porsi pengeluaran untuk kegiatan ekonomi yang didominasi kelompok kaum miskin menjadi berkurang.¹⁹

Korupsi Bagian dari Perang Proxy

Mengaca pada argumentasi yang penulis sudah sampaikan pada bagian sebelumnya, penulis merasa penting

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19-20.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20

untuk mengangkat tema korupsi sebagai bagian dari perang *proxy* pada tulisan ini. Kelihatan bahwa korupsi sangat memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan hidup sebuah negara. Bahkan, pendapatan perkapita Indonesia dapat meningkat 1.5 kali lebih tinggi dari nilainya sekarang jika kita mampu mengurangi tingkat korupsi sampai paling tidak ke tingkat korupsinya Malaysia, yang berada di peringkat 88 *International Country Risk Guide Index* (ICRG).²⁰

Hanya segelintir orang saja yang dapat menikmati hasil dari kekayaan alam bangsa ini. Selebihnya hanya menikmati remah-remahnya saja, seperti teori ekonomi “*trickle down effect*” ala Orde Baru, yang menganggap jika segelintir masyarakat kaya akan menurunkan kekayaannya itu kepada kelompok masyarakat yang lebih besar. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Pancasila bahwa negara ini dibangun dengan berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat saja.

Kekuasaan membuat manusia rapuh di hadapan naluri menguasai. Dalam banyak kasus, moral apa pun tak mampu mengontrol hasrat akan kekuasaan, sebaliknya malah bisa dijungkirbalikan demi semua itu. Tidak sulit menengarai, para pemegang kekuasaan adalah agen pembusukan yang sangat berkuasa, dan tentu sangat korup karena korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio*, yang berarti pembusukan. Jadi, korupsi bukan hanya perkara penggelapan,

²⁰ *Ibid*, hlm, 21.

pencurian, dan perampokan uang negara. Masyarakat dikatakan rusak parah kalau keluasan korupsi begitu ganas sehingga menghancurkan etika hidup bersama. Kejernihan, kecerdasan, dan kepekaan terhadap hidup bersama menguap.²¹

Panglima jelas menyebutkan bahwa perang *proxy* adalah perang yang tidak kelihatan dan tanpa bentuk. Dalam perang *proxy* tidak bisa dilihat siapa lawan dan kawan, tetapi perang tersebut dikendalikan oleh negara lain. Ada banyak negara yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia melalui perang *proxy*. Hal tersebut terjadi karena kesuburan tanah Indonesia, posisi geografis yang sangat strategis, serta memiliki kekayaan alam hayati dan non-hayati yang luar biasa.²² Korupsi adalah sebuah “perang” tanpa bentuk, yang tidak jelas siapa lawan dan kawan. Sesama anak bangsa saja bisa saling menghabisi, hanya demi materi yang didapatkan dari tindakan korupsi.

Panglima TNI pun menambahkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dengan penduduknya yang sangat banyak.²³ Dengan jumlah penduduk yang besardan kekayaan alam yang banyak, potensi Indonesia untuk menjadi negara besar

²¹ Maria Hartiningsih (ed), *Korupsi Yang Memiskinkan*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. ix.

²² Unpad, “Waspada, Proxy War Menyerang Berbagai Aspek Kehidupan di Indonesia”, dalam <http://www.unpad.ac.id/2016/03/waspada-proxy-war-menyerang-berbagai-aspek-kehidupan-di-indonesia/>, diakses pada 12 Januari 2017.

²³ Okezone, “Panglima TNI Minta Masyarakat Waspada Proxy War”, dalam <http://news.okezone.com/read/2016/08/27/337/1474391/panglima-tni-minta-masyarakat-waspada-proxy-war>, diakses pada 9 Januari 2017.

dan berpengaruh di dunia internasional sangatlah besar. Untuk itu, tentunya banyak pihak-pihak di luar yang tidak berkeinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita semua paham bahwa kekayaan alam bangsa ini sejak ratusan tahun lalu dieksploitasi oleh bangsa asing, bahkan hingga saat ini. Kondisi ini membuat bangsa kita menjadi bangsa yang selalu bergantung pada asing karena tidak mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri.

Sikap yang selalu bergantung kepada pihak lain, alias tidak mandiri itulah yang menyuburkan budaya korupsi di bangsa ini. Sejarah birokrasi di negeri ini sangat terkait dengan sistem penjajahan Belanda, yang mana aparat birokrasi hanya dibentuk untuk melayani kepentingan Belanda. Birokrasi tidak bekerja untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tetapi melayani penguasa. Akibatnya, munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, penyalahgunaan jabatan, dll jika aparat birokrasi berhubungan dengan masyarakat.

Ditambah dengan budaya “ABS” (Asal Bapak Senang), membuat penguasa semakin dilayani, tetapi masyarakat semakin kehilangan hak-haknya. Perilaku seperti ini tertular ke seluruh lapisan masyarakat sehingga lama-kelamaan menjadi budaya.²⁴ Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, seranglah nilai-nilainya. Menurut Sun Tzu, perang yang baik adalah jika kita

mampu mengalahkan musuh tanpa harus berperang.²⁵

Penulis berpendapat bahwa kondisi ini pastilah direkayasa oleh Belanda saat itu. Belanda tentunya tidak ingin rakyat Indonesia menjadi pintar, terdidik, dan sadar bahwa mereka selama ini hanya diperalat. Sekalipun Bung Karno dan para pahlawan kemerdekaan Indonesia lainnya akhirnya berhasil memerdekakan negeri ini, akan tetapi budaya koruptif itu masih terbawa. Apalagi, di era Presiden Soeharto KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) berkembang luas, menyebabkan budaya korupsi terus dilestarikan hingga era reformasi saat ini.

Belum lagi kebergantungan (dependensi) dengan bangsa asing terkait pengelolaan sumber daya alam yang sampai saat ini masih terjadi. Penulis yakin bahwa kondisi ini sengaja diciptakan pihak-pihak di luar Indonesia agar negeri ini tidak pernah berkembang menjadi negara maju. Banyak pihak yang takut jika Indonesia dapat menjadi pemain besar dunia sekelas Amerika Serikat atau Cina. Untuk itu, budaya korupsi secara tidak langsung dilanggengkan oleh mereka. Semakin korup sebuah bangsa, maka semakin miskin pula bangsanya.

Kondisi demikian tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain di dunia, utamanya yang memiliki sumber daya alam melimpah, juga mengalami kemiskinan yang salah satunya disebabkan oleh karena korupsi. Menurut penelitian ICRG dari tahun 1991-1997, Irak, Gabon,

²⁴ Gatot Soedarto, *Sun Tzu dan Seni Perang Modern di Mandala Lautan*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2003), hlm. 45.

²⁵ *Ibid*, hlm. 32.

dan Sierra Leone menempati urutan 1-3 negara dengan indeks korupsi tertinggi. Irak dan Gabon adalah negara penghasil minyak bumi, sedangkan Sierra Leone terkenal sebagai penghasil intan dan kristal terbesar di dunia. Indonesia sendiri ada di peringkat 28.²⁶

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa negara dengan banyak sumber daya alam memiliki kecenderungan tingkat korupsi yang tinggi. Tentunya sulit untuk mengesampingkan fakta bahwa hal ini hanya kebetulan. Negara-negara kecil dengan kekayaan alam melimpah, terkesan direkayasa agar tidak menjadi negara maju, sekalipun memiliki modal yang besar untuk itu.

Sektor sumber daya alam berpotensi besar untuk dikorupsi. Kerentanan korupsi dalam sektor sumber daya alam itu diantaranya disebabkan oleh teknis pengelolaan sumber daya alam cukup rumit, mulai dari eksplorasi, lisensi, kontrak, aturan, harga, distribusi, hingga penjualan. Industri sumber daya alam cenderung tersentralisasi dan tidak banyak pemainnya. Kontrol atas sumber daya alam juga menjadi hak negara atau pemerintah daerah. Di negara korup, sektor ini menjadi alat untuk mencapai tujuan politik partai atau pribadi pemegang kekuasaan. Di sisi lain, sebagian industri ekstraktif selama ini justru merasa diuntungkan oleh iklim koruptif di negara-negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena dengan

itu, mereka bisa mendapatkan kontrak yang menguntungkan, cukup dengan menyuap sejumlah pejabat setempat.²⁷

Berkaitan dengan judul tulisan ini, karena itulah penulis menyatakan bahwa korupsi adalah bagian dari perang *proxy* yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan bangsa kita. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, korupsi membuat masyarakat Indonesia miskin karena tingkat perekonomian yang tidak meningkat. Akan tetapi, di sisi lain budaya konsumtif masyarakat kita semakin meningkat. Indonesia hanya menjadi pasar bagi barang-barang asing, tanpa mampu mengembangkan secara massal produk lokal untuk diekspor ke luar negeri.

Budaya konsumtif pun merupakan akar dari banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini merupakan akibat tindak langsung dari perang *proxy*. Semakin konsumtifnya masyarakat, maka semakin mereka terjebak pada budaya kapitalistik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Akhirnya, demi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuannya, banyak orang melakukan korupsi.

Padahal, jika di rata-rata sebenarnya taraf hidup mereka sudah mencukupi. Akan tetapi, karena budaya konsumtif tadi mereka merasa perlu untuk mendapatkan hal-hal yang tidak penting, hanya demi gengsi semata. Perilaku ini

²⁷ Indonesia Corruption Watch, "Mengapa Negara Kaya Sumber Alam Miskin?", dalam <http://www.antikorupsi.org/en/content/mengapa-negara-kaya-sumber-alam-miskin>, diakses pada 21 Januari 2017.

²⁶ Basyaib, *op cit*, hlm. 26-27.

yang disebut konsumtif, dan merupakan bagian dari ancaman perang *proxy* karena hanya mementingkan diri sendiri dan menghilangkan rasa cinta tanah air, serta menimbulkan sikap ketidakpedulian sosial.

Memang belum ada kajian literatur yang secara tegas menunjukkan adanya hubungan langsung antara korupsi dan kemiskinan, akan tetapi kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi mempengaruhi upaya pengentasan orang miskin. Korupsi telah berkonsekuensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena alokasi anggaran tidak seluruhnya sampai ke tujuan. Ini yang akhirnya terkait dengan rendahnya laju penurunan angka kemiskinan.²⁸ Sesuai dengan pengertian korupsi yang sudah disebutkan di atas pun, korupsi berkaitan dengan tindakan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi.

Menurut ICW, korupsi tersebar di lima sektor yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, yakni sektor keuangan daerah, disusul dengan infrastruktur, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan pertanahan. Ditambah bidang kesehatan, listrik, pajak, transportasi, dan olahraga yang masuk 10 besar sektor terkorup, makin signifikan kaitan korupsi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jadi, korupsi tidak hanya mengerus anggaran pendidikan atau kesehatan rakyat saja, tetapi juga merusak kapasitas regulatif, tata pemerintahan, dan terutama menghancurkan seluruh

kehidupan bermasyarakat.²⁹

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah uang yang dikorupsi (nilai eksplisit). Tindak pidana ini juga menimbulkan kerusakan yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Itulah sebabnya penulis mengategorikan korupsi sebagai bagian dari perang korupsi. Dampak korupsi sangat besar bagi masyarakat dan negara ini secara holistik.

Selain itu, jika bangsa ini terus-menerus mengalami kemunduran ekonomi, akibatnya juga dirasakan oleh sektor pertahanan, terutama anggaran pertahanan kita. Anggaran pertahanan Indonesia sulit untuk menyesuaikan diri dengan ancaman yang muncul. Salah satu indikator penentuan jumlah anggaran pertahanan suatu negara adalah bagaimana negara tersebut meresponi ancaman yang muncul, baik dari segi jumlahnya maupun bentuknya. Jika bangsa ini terus miskin, maka pembangunan pertahanan Indonesia di masa datang akan terancam. Anggaran pertahanan yang harusnya di atas 2%, setidaknya sesuai dengan batasan yang diterapkan oleh NATO agar sebuah

²⁹ *Ibid*, hlm. 28-29.

³⁰ Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, "Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 3.

²⁸ Hartiningsih, *op.cit*, hlm. 26.

negara dapat mempertahankan dirinya, tidak akan pernah tercapai. Sampai saat ini anggaran pertahanan kita berputar-putar saja di kisaran angka 1% ke bawah.

Kembali ke soal perang *proxy*, penulis melihat bahwa ini adalah upaya pihak-pihak di luar yang tidak senang dengan kebangkitan kekuatan pertahanan Indonesia. Mereka takut apabila Indonesia mampu mengembalikan kejayaan militer kita seperti pada jaman Bung Karno dulu. Karena itulah korupsi akan terus-menerus tumbuh subur, karena memang direkayasa untuk tetap menjadi seperti itu. Semakin banyaknya anggaran negara yang dikorupsi, maka semakin berkuranglah anggaran yang dialokasikan untuk bidang pertahanan. Hal ini berdampak pada berkurangnya kemampuan segenap komponen bangsa, tidak hanya Kemhan dan TNI, untuk melawan ancaman-ancaman pertahanan dan keamanan dari luar, maupun dari dalam negeri.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya, lebarnya jurang antara si kaya dengan si miskin membuat korupsi merajalela. Hal ini karena di negara-negara seperti itu korupsi sudah mendarah daging, sehingga akhirnya membudaya di tengah masyarakatnya. Sayangnya, di Indonesia saat ini, budaya masyarakat kita sudah terkooptasi oleh budaya korupsi, yang didalamnya termasuk kolusi, nepotisme, pungli, gratifikasi, dan lain-lain, yang kesemuanya masuk di dalam

kategori penyalahgunaan wewenang.

Karena itulah, di negara di mana korupsi sudah dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, ancaman terhadap keamanan nasionalnya bukan lagi berasal dari luar, tetapi dari dalam negara itu sendiri. Inilah ancaman perang *proxy* yang dimaksudkan oleh Panglima TNI di atas, bahwa perang yang dewasa ini terjadi adalah perang tanpa bentuk. Korupsi bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan peningkatan alpalhankam (alat peralatan pertahanan keamanan), tetapi dengan mengubah struktur masyarakat, sehingga budayanya pun berubah.

Dengan demikian, bukan hanya kesiapan militer saja yang harus dilakukan sebuah negara dalam menyusun pertahanannya, melainkan juga berbagai hal di luar ancaman militer, mulai dari soal ideologi sampai ekonomi. Bicara ekonomi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa korupsi terkait dengan ekonomi, maka sudah selayaknya sistem pertahanan Indonesia mulai dirancang untuk menyesuaikan dengan ancaman jenis ini.

Ancaman non-militer atau ancaman kon-konvensional seperti ini adalah tantangan baru bagi TNI. Di satu sisi, TNI tetap harus menjaga netralitasnya dalam ranah sipil agar tidak bermain sosial politik seperti pada era Orde Baru lalu. Akan tetapi, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara sekarang sudah sangat kompleks, seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Mengandalkan

Kepolisian saja tentunya adalah sebuah hal yang mustahil. TNI harus menempatkan dirinya sebagai garda pelindung bangsa, bahu-membahu bersama Polri mengatasi masalah ini.

Terkait korupsi, masalah ini harus dilihat sebagai ancaman terhadap kesatuan negara kita. Dengan dampak buruk korupsi yaitu memiskinkan masyarakat, dan juga berdampak langsung terhadap tingkat perekonomian kita, maka sudah pantas jika TNI harus mengambil sikap. TNI memang tidak bisa menjalankan tugas seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam hal penindakan korupsi, akan tetapi TNI dapat memainkan perannya dalam hal pemberantasan korupsi.

Sistem pertahanan negara harus dengan ini sesuai dengan pendapat Holsti di atas, bahwa pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Selain itu, kepentingan keamanan nasional merupakan bentuk keinginan dan kebutuhan suatu negara dalam rangka melindungi rakyat, wilayah, gaya hidup, institusi, dan nilai-nilai yang dianut.³¹ Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sangat tidak sesuai dengan korupsi.

Korupsi pasca-reformasi dianggap sebagai musuh utama bangsa. Dengan itu, korupsi adalah lawan dari *core*

³¹ T. Hari Prihartono dan Yandry Kasim, "Intelijen Pertahanan: Tinjauan Literatur dan Perspektif Historis Indonesia", dalam Andi Widjajanto (ed), *Negara, Intel, dan Ketakutan*, (Jakarta: PACIVIS, 2006), hlm. 44.

value bangsa, bertentangan dengan kepentingan nasional, mengancam eksistensi bangsa, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk itu, korupsi adalah ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara kita. Korupsi adalah bagian dari perang *proxy* karena bersifat tanpa bentuk, tidak kelihatan, termasuk tidak bisa dideteksi siapa yang bermain (pihak asing) dibelakang ini.

Bagaimana cara TNI terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus membangun sistem pertahanan negara yang efektif untuk menghadapi ancaman ini, adalah melalui program bela negara. Program ini diharapkan dapat mengubah budaya masyarakat agar tidak koruptif. Program yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan ini haruslah digalakkan secara serius dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat. Pertahanan negara yang efektif dapat terwujud jika segenap komponen bangsa telah mengikuti program bela negara. Mereka akan menempatkan negara sebagai hal yang terutama, sehingga dengan demikian menghilangkan segala perilaku koruptif yang ada dalam dirinya.

Atas dasar itulah, dalam tulisan ini penulis menyajikan argumentasi bahwa untuk menghadapi bahaya korupsi yang merajalela di Indonesia diperlukan sebuah program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama. Dengan begitu luasnya virus

korupsi yang sudah merebak di bangsa ini, yang mengakibatkan kemiskinan, maka program bela negara adalah sarana yang efektif untuk digunakan sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi.

Sebelum membahas bagaimana program bela negara dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi korupsi, kita harus memahami definisi bela negara yang ada dalam undang-undang. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali

ditentukan lain dengan undang-undang.

Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini tercantum dalam undang-undang pertahanan negara, di pasal 1 Ayat 1, yaitu “Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin pernah mengatakan bahwa wujud bela negara dapat ditafsirkan dalam bentuk pemberantasan korupsi. Beliau mengatakan, dengan bela negara, kita tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk bangsa dan negara. Korupsi biasanya dilakukan untuk kepentingan perorangan dan kelompok. Maka, dengan bela negara kita hapus kepentingan perorangan dan kelompok. Ia berharap segenap lapisan masyarakat dapat menanamkan rasa bela negara, dengan mewujudkan rasa saling memiliki dan menghargai.³²

Sjafrie kemudian menambahkan, bela negara menuntut setiap rakyat untuk tidak memikirkan diri sendiri. Perilaku korupsi merupakan bentuk tindakan yang justru bertentangan dengan upaya

³² Tribun News, “Pemberantasan Korupsi Termasuk Wujud Bela Negara”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/12/19/pemberantasan-korupsi-termasuk-wujud-bela-negara>, diakses pada 10 Januari 2017.

bela negara. Sikap bela negara harus terus dipupuk demi terwujudnya sikap cinta Tanah Air. Bela negara itu bukan milik militer saja, tetapi untuk rakyat RI yang berjuang untuk bangsa dan negara. Terakhir, Sjafrie berpendapat bahwa sikap bela negara juga harus lebih dikuatkan pada aspek intelektualitas. Hal ini karena tuntutan bela negara sekarang itu sudah mulai meningkat. Hal itu tidak cukup dihadapi dengan militansi, tetapi harus dengan intelektualitas.³³

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Korupsi juga menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan mengkhianati cita-cita perjuangan bangsa. Disinilah peran program bela negara menjadi penting guna membela atau melindungi tanah airnya dari kejahatan-kejahatan para koruptor.

Terdapat 4 tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk menangani tindakan korupsi dalam upaya bela negara. Pertama, membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun

³³ Berita Sore, "Wamenhan: Sikap Bela Negara Tekan Korupsi", dalam <http://beritasore.com/2012/12/19/wamenhan-sikap-bela-negara-tekan-korupsi/>, diakses pada 17 Januari 2017.

swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. Kedua, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

Ketiga, menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Keempat, menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.³⁴

Secara praktis, sesuai dengan program bela negara yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, maupun oleh TNI, doktrinasi nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa akan lebih banyak diterapkan dalam program ini. Program bela negara memang tidak serta merta menerapkan tindakan-tindakan yang dilakukan KPK misalnya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, akan

³⁴ Jurnal Patroli News, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara", dalam <http://jurnalpatrolinews.com/2015/05/07/pemberantasan-korupsi-sebagai-wujud-bela-negara/>, diakses pada 10 Januari 2017.

tetapi program ini akan menekankan pada diseminasi nilai-nilai tadi kepada para peserta didik, yang disesuaikan untuk memberantas korupsi. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam program bela negara juga diharapkan dapat mencegah budaya korupsi menyebar kepada seluruh insan masyarakat.

Untuk itu, dalam materi-materi yang disampaikan didalam program bela negara, hal-hal di atas akan lebih banyak disampaikan. Menurut penulis, proses penyampaian materi seperti ini akan efektif karena sasaran program bela negara adalah para kaum muda di Indonesia, yang bervariasi mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama sampai Universitas. Pemahaman buruknya budaya korupsi harus dimulai sejak tahap tersebut karena anak muda biasanya masih belum terlalu terpengaruh budaya korupsi.

Bahkan, jika memungkinkan Kemhan atau TNI dapat menerapkan program bela negara sejak Sekolah Dasar karena pada usia demikianlah materi-materi yang terkait nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa sangat tepat untuk diajarkan. Anak-anak di usia ini diibaratkan masih seperti kertas putih yang siap dituliskan tinta. Jika kita mengajarkan perilaku yang baik, maka mereka akan mengamalkannya sampai dewasa kelak. Tentunya program bela negara khusus untuk mereka akan disesuaikan materinya agar tepat untuk diimplementasikan kepada anak-anak SD.

Bela negara pastinya memiliki perbedaan dengan wajib militer. Wajib militer (*conscription*) adalah sebuah konsep terkait perekrutan warga negara dengan tidak secara sukarela (*involuntarily*) untuk institusi militer yang bertujuan untuk mobilisasi pasukan saat perang atau krisis. Wajib militer berlaku untuk semua warga negara, khususnya pria, dengan usia umumnya 18 sampai 45 tahun. Seorang yang dipanggil untuk mengikuti wajib militer biasanya mengabdikan selama 1 sampai 3 tahun.³⁵

Atas dasar pengertian wajib militer di atas, hilangkan anggapan jika bela negara ini adalah program wajib militer yang pesertanya akan diajarkan cara berperang seperti tentara. Bela negara belum mencapai tahap itu. Apalagi, kembali kita harus mengingat bahwa ancaman terbesar bangsa ini bukan ancaman militer, tetapi non-militer, yang tidak tepat jika dihadapi hanya dengan keahlian dalam berperang saja. Sebagai bagian dari perang *proxy*, korupsi harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan mereka-mereka yang memiliki kemampuan tempur saja.

Begitu pula dengan ancaman korupsi, dimana ia telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini selama puluhan tahun. Bela negara menjadi wadah yang pas agar ancaman jenis ini tidak lagi membudaya di bangsa kita tercinta. Materi-materi yang

³⁵ Beni Sukadis, "Developing TNI'S Capability and Conscription", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscription: Indonesia's Experience and Other Democracies*, (Jakarta: LESPERSI, 2008), hlm. 61.

diberikan dalam program bela negara akan membantu kampanye upaya pemberantasan korupsi yang selama ini disuarakan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan segenap masyarakat sipil anti-korupsi. Akan tetapi, kampanye saja tidaklah cukup. Dibutuhkan sebuah program yang secara formal dan jelas mampu mencakup segenap elemen bangsa, sehingga penerapannya pun komprehensif dan tentunya efektif.

Terakhir, program bela negara menurut penulis adalah program yang sangat efektif untuk diimplementasikan di Indonesia dewasa ini. Terlebih, beragamnya ancaman dan tantangan bagi bangsa ini membuat segenap komponennya harus siap menghadapinya. Korupsi sebagai bagian dari perang *proxy* membuat upaya pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara tradisional lagi, melainkan harus dilakukan secara kontekstual. Program bela negara dapat menjadi sarana yang tepat untuk melawannya.

Kesimpulan

Korupsi adalah tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Korupsi juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Karena itu, korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Banyak anak bangsa yang dimiskinkan oleh karena tindak pidana korupsi, di mana di sisi lain para pelakunya menikmati kekayaan yang berlimpah.

Korupsi adalah sebuah medan peperangan yang sama sekali jauh berbeda dengan terminologi perang yang kita biasa pahami. Perang jenis ini adalah perang tanpa senjata, tanpa tentara, dan tanpa teritori. Perang ini adalah pertempuran yang tidak menyerang dengan bedil, tetapi yang menyerang hati nurani manusia dengan godaan materialisme. Kesulitan berperang dalam perang jenis ini, bahwa yang diperangi adalah anak bangsa sendiri.

Korupsi adalah bagian dari perang *proxy* karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup sebuah negara. Korupsi adalah salah satu ancaman non-konvensional terbesar yang bangsa ini saat ini sedang hadapi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan alam yang banyak, potensi Indonesia untuk menjadi negara besar dan berpengaruh di dunia internasional sangatlah besar.

Untuk itu, tentunya banyak pihak-pihak di luar yang tidak berkeinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita semua paham bahwa kekayaan alam bangsa ini sejak ratusan tahun lalu dieksploitasi oleh bangsa asing, bahkan hingga saat ini. Kondisi ini membuat bangsa kita menjadi bangsa yang selalu bergantung pada asing karena tidak mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri.

Sikap yang selalu bergantung kepada pihak lain, alias tidak mandiri itulah yang menyuburkan budaya korupsi di bangsa ini. Sejarah birokrasi di negeri ini

sangat terkait dengan sistem penjajahan Belanda, yang mana aparat birokrasi hanya dibentuk untuk melayani kepentingan Belanda. Birokrasi tidak bekerja untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tetapi melayani penguasa. Akibatnya, munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, penyalahgunaan jabatan, dll jika aparat birokrasi berhubungan dengan masyarakat. Jadi, negara di mana korupsi sudah dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, ancaman terhadap keamanan nasionalnya bukan lagi berasal dari luar, tetapi dari dalam negara itu sendiri.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Wujud bela negara dapat ditafsirkan dalam bentuk pemberantasan korupsi. Program bela negara akan menekankan pada diseminasi nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa kepada para peserta didik, yang disesuaikan untuk memberantas korupsi. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam program bela negara juga diharapkan dapat mencegah budaya korupsi menyebar kepada seluruh insan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Basyaib, Hamid, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim (ed). 2002. Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN. Jakarta: Yayasan Aksara.
- Djaja, Ermansyah. 2009. Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 Versi UU Nomor 30 tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartiningsih, Maria (ed). 2011. Korupsi Yang Memiskinkan. Jakarta: Kompas.
- Helmanita, Karlina dan Sukron Kamil (ed). 2011. Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN.
- Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategi dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.
- Prabowo, J. Suryo. 2013. Operasi Lawan Insurgensi: Bukan Hanya Operasi Militer. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional.
- Prihartono, T. Hari dan Yandry Kasim. 2006. "Intelijen Pertahanan: Tinjauan Literatur dan Perspektif Historis Indonesia", dalam Andi Widjajanto (ed), *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: PACIVIS.
- Soedarto, Gatot. 2003. *Sun Tzu dan Seni Perang Modern di Mandala Lautan*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Sukadis, Beni. 2008. "Developing TNI'S Capability and Conscription", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*. Jakarta: LESPERSSI.

Jurnal

- Zulaiha, Aida Ratna dan Sari Angraeni. 2016. "Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan". *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol. 2. No. 1.

Website

- Berita Sore. "Wamenhan: Sikap Bela Negara Tekan Korupsi", dalam <http://beritasore.com/2012/12/19/wamenhan-sikap-bela-negara-tekan-korupsi/>, diakses pada 17 Januari 2017.
- CNN. "Soekarno Sudah Ramalkan Ancaman Perang Proxy di Indonesia", dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151220194759-20-99440/soekarno-sudah-ramalkan-ancaman-perang-proxy-di-indonesia/>, diakses pada 12 Januari 2017.
- Indonesia Corruption Watch. "Mengapa Negara Kaya Sumber Alam Miskin?", dalam <http://www.antikorupsi.org/en/content/mengapa-negara-kaya-sumber-alam-miskin>, diakses pada 21 Januari 2017.
- Jurnal Patroli News. "Pemberantasan Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara", dalam <http://jurnalpatrolinews.com/2015/05/07/pemberantasan-korupsi-sebagai-wujud-bela-negara/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- Merdeka. "Proxy war, perang yang ditakuti Jenderal Gatot terjadi di Indonesia", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/proxy-war-perang-yang-ditakuti-jenderal-gatot-terjadi-di-indonesia.html>, diunduh pada 20 Januari 2017.
- Okezone. "Panglima TNI Minta Masyarakat Waspada Proxy War", dalam <http://news.okezone.com/read/2016/08/27/337/1474391/panglima-tni-minta-masyarakat-waspada-proxy-war>, diakses pada 9 Januari 2017.
- Rappler. "Harga pangan naik, Panglima TNI ingatkan Proxy War", dalam <http://www.rappler.com/indonesia/134777-harga-pangan-naik-panglima-tni-proxy-war>, diakses pada 20 Januari 2017.
- Tribun News. "Pemberantasan Korupsi Termasuk Wujud Bela Negara", dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/12/19/pemberantasan-korupsi-termasuk-wujud-bela-negara>, diakses pada 10 Januari 2017.
- Transparency International Indonesia. "Corruption Perceptions Index 2015: Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik", dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>, diakses pada 21 Januari 2017.
- Unpad. "Waspada, Proxy War Menyerang Berbagai Aspek Kehidupan di Indonesia", dalam <http://www.unpad.ac.id/2016/03/waspada-proxy-war-menyerang-berbagai-aspek-kehidupan-di-indonesia/>, diakses pada 12 Januari 2017.